

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya mengikat dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu sumber pendapatan Kabupaten Batang berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/ atau Minuman dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman berasal dari jumlah pembayaran yang diterima penyedia makanan yang disetorkan melalui sistem *Self Assessment System* kepada BPKPAD Kabupaten Batang.

Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Tahun 2024 menduduki peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah dengan penanaman modal terbesar di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 6,389 triliun. Salah satu sumber pendapatannya berasal dari persentase penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Persentase Penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2020	1.400.000.000	2.193.003.304	156,64
2.	2021	2.600.000.000	3.910.680.751	150,41
3.	2022	6.100.000.000	6.458.924.830	105,88
4.	2023	6.875.000.000	7.509.754.872	109,23
5.	2024	7.700.000.000	8.206.771.331	106,58

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang (2025)

Tabel 1.1 menjelaskan persentase penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada periode 2020 s/d 2024 menunjukan tren positif meskipun terdapat variasi persentase pencapaian tiap tahunnya. Pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 1,4 miliar dengan realisasi 2,19 miliar yang menunjukan realisasi melebihi target sebesar 56,64% dengan persentase 156,64%. Pada tahun 2021 target ditetapkan 2,6 miliar dengan realisasi 3,91 miliar menghasilkan realisasi lebih tinggi 50,41% dari target yang ditetapkan dengan persentase 150,41%. Tahun 2023 target ditetapkan 6,875 miliar dan realisasi 7,51 miliar menghasilkan hasil aktual melebihi target, dengan selisih lebih kecil dari tahun sebelumnya dengan persentase 109,23%. Pada tahun 2024 target ditetapkan 7,7 miliar dengan realisasi 8,21 miliar dengan persentase mencapai 106,58%, meskipun target mengalami peningkatan akan tetapi persentase pencapaian lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman pada Kabupaten Batang secara keseluruhan target mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi selalu melebihi target, akan tetapi persentase pencapaian mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan persentase, tidak mempengaruhi realisasi karena melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Teori pada penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang diatur pada Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu mencapai tahapan lelang, akan tetapi secara praktik penagihan tidak sampai dengan tahap lelang karena tidak adanya kewenangan, sehingga kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan teori. Dalam penjelasan masalah yang dihadapi maka penulis memutuskan untuk mengambil topik penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini disusun sebagai batasan pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penjelasan dengan memberikan inti yang harmonis, jelas, dan sistematis sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Luasnya kegiatan pada Bidang Perpajakan terutama pada Pajak Daerah, supaya tidak terjadi penyimpangan dari judul “Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang”. Dalam lingkup tulisan ini, akan membahas hal-hal berikut :

1. Definisi Prosedur.
2. Gambaran Umum Pajak Daerah.
3. Gambaran Umum PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
4. Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
5. Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman BPKPAD Kabupaten Batang.
6. Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
7. Kendala Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman BPKPAD Kabupaten Batang.
8. Solusi permasalahan Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman BPKPAD Kabupaten Batang.

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

Penulis membagi sub bagian menjadi 2 (dua) yaitu tujuan penulisan dan Kegunaan Penulisan yang dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan mengenai Definisi Prosedur.
2. Menguraikan secara umum mengenai Pajak Daerah.
3. Menjelaskan tentang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman meliputi dasar hukum, subjek dan wajib pajak, objek dan pengecualian objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, dan dasar pengenaan dan tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
4. Menguraikan tentang Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
5. Menguraikan tentang Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.
6. Menjelaskan perbedaan teori dan praktik pada Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.
7. Menjelaskan kendala yang dihadapi pada Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.
8. Bertujuan menjelaskan solusi permasalahan dari Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulis dalam menyusun Tugas mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat dari penulisan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak terkait antara lain :

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Bertujuan menambah wawasan terkait Pajak Daerah dan menambah informasi mengenai Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.

- b. Dapat membandingkan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktik di lapangan mengenai Prosedur Penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman di BPKPAD Kabupaten Batang.
2. Bagi Universitas Diponegoro :
- a. Sebagai sumber referensi untuk menyempurnakan kurikulum terkait pajak daerah dalam pembelajaran mata kuliah perpajakan.
 - b. Dapat menambah referensi terkait Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.
3. Bagi BPKPAD Kabupaten Batang :
- a. Sebagai bahan evaluasi mengenai PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.
 - b. Sebagai informasi dan untuk evaluasi mengenai sistem prosedur penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulis menggunakan 2 (dua) metode dalam menyusun Tugas Akhir yaitu metode pengumpulan data dan jenis data yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Jenis Data

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sifat, waktu pengumpulan, sumber, skala pengukuran, dan strukturnya. Penulis memaparkan jenis-jenis data dalam penyusunan Tugas Akhir, antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dalam suatu penelitian dari responden atau sumber data terkait variabel penelitian. Dalam data primer dapat berupa wawancara, observasi, survei, dan hasil pengisian riset dengan responden terkait yang dilaksanakan peneliti pada BPKPAD Kabupaten Batang (Undari, 2024)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dilakukan melalui media perantara yang didapatkan dari sumber yang telah ada sebelumnya berupa dokumen atau

data yang dimiliki oleh pihak BPKPAD Kabupaten Batang. Adapun contoh data sekunder antara lain artikel, jurnal, buku, laporan keuangan dan sumber data pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh juga melalui penelusuran media sosial, serta dari dokumen dan publikasi pemerintah Kabupaten batang (Undari, 2024).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penulisan laporan. Adapun metode pengumpulan yang digunakan sebagai pedoman penulisan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal berupa percakapan yang memiliki tujuan mendapatkan informasi dengan objek yang diteliti. Proses wawancara diharapkan dijalankan dengan baik dan benar dengan tujuan mendapatkan informasi dari sumber data yang dilakukan di BPKPAD Kabupaten Batang (Zuchri, 2021).

2. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati perilaku sekitar. Kunci keberhasilan dalam observasi terletak pada peneliti dalam mengetahui dan mencari lebih dalam mengenai tingkah laku non verbal yang ada pada BPKPAD Kabupaten Batang (Zuchri, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya berupa tulisan, gambar, foto, dan arsip dokumen yang diperoleh peneliti pada BPKPAD Kabupaten Batang (Zuchri, 2021).

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan dalam laporan Tugas Akhir bertujuan untuk memudahkan penyelesaian permasalahan dari judul yang diambil dalam penyusunan Tugas Akhir. Berikut adalah sistematika penyusunan Tugas Akhir :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, prosedur pengumpulan data, metode pengumpulan data, jenis data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab II Gambaran umum pada Tugas Akhir ini membahas mengenai gambaran umum yang meliputi sejarah instansi, lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi anggaran BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III membahas tentang pengertian tata cara, gambaran umum pajak daerah, gambaran umum dan tata cara penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Tinjauan praktik membahas tentang tata cara penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, perbedaan teori dan praktik, kendala dalam tata cara penagihan, dan upaya dalam tata cara penagihan di BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB IV PENUTUP

Bab IV penutup pada penyusunan Tugas Akhir membahas mengenai rangkuman dari penyusunan Tugas Akhir yang berisikan kesimpulan serta saran pada judul yang diambil penulis berjudul “Prosedur Penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang”.